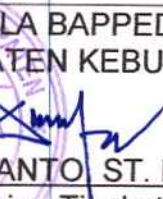


 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nomor SOP	067/589												
	Tanggal Pembuatan	1 Maret 2022												
	Tanggal Revisi													
	Tanggal Efektif	1 April 2022												
	Disahkan Oleh	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN  <u>EDI RIANTO, ST. MT</u> Pembina Tingkat I NIP.19701101 199803 1 006												
Nama SOP	Penanganan Pengaduan <i>Whistle Blower</i> dan Pengaduan Masyarakat													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blower System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;		Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen <table border="1" data-bbox="1133 1022 1523 1293"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Paraf</th> <th>Tgl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekretaris</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kabid</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Sekretaris</i></td> <td><i>t</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Paraf	Tgl	Sekretaris			Kabid			<i>Sekretaris</i>	<i>t</i>	
Jabatan	Paraf	Tgl												
Sekretaris														
Kabid														
<i>Sekretaris</i>	<i>t</i>													
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN												
1. Laporan Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).		Laporan Pengaduan, jawaban pengaduan												
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN												
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penanganan Pengaduan <i>Whistle Blower</i> dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen akan terhambat.		Dicatat sebagai data elektronik dan manual.												

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nomor SOP	067/589
	Tanggal Pembuatan	1 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 April 2022
	Disahkan Oleh	 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN EDI RIANTO ST. MT Pembina Tingkat I NIP.19701101 199803 1 006
Nama SOP	Penanganan Pengaduan <i>Whistle Blower</i> dan Pengaduan Masyarakat	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blower System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;		Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Laporan Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).		Laporan Pengaduan, jawaban pengaduan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penanganan Pengaduan <i>Whistle Blower</i> dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen akan terhambat.		Dicatat sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN (SOP)
PENANGANAN PENGADUAN WHISTLE BLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT
(PENGADUAN TIDAK LANGSUNG)

No	Kegiatan	Pelaksana						Keterangan	
		Masyarakat/ Pegawai	Tim Penanganan	Pejabat Struktural	Kepala Bappeda	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengadukan/ melaporkan pelayanan, kegiatan BAPPEDA					Surat aduan	Tentative	Surat aduan	
2.	Menerima dan melaporkan					Surat aduan dan Register	1 jam	Surat aduan dan Register	
3.	Memerintahkan untuk menangani pengaduan					Surat aduan, Surat disposisi	1 jam	Surat aduan, Surat disposisi	
4.	Melakukan telaah terhadap pengaduan dan menyampaikan laporan hasil telaahan					Surat aduan, laporan hasil telaah aduan	Tentative	Surat aduan, laporan hasil telaah aduan	
5.	Memutuskan tindakan lanjut pengaduan					Surat keputusan, Surat aduan	Tentative	Surat keputusan, Surat aduan	
6.	Menerima hasil tindak lanjut					Surat keputusan, Surat aduan	1 jam	Surat keputusan, Surat aduan	